

**Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian
di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan***Implementation of the Policy for Delegating Personnel Affairs Authority at
the Public Works Department of Highways and Spatial Planning
South Sumatera Province***Sri Sulastri¹⁾, Femi Asteriniah²⁾ Desi Ariyati³⁾***¹ STISIPOL Candradimuka, Indonesia² STISIPOL Candradimuka, Indonesia³ Program Studi Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia

E-mail correspondences: desi.aryati@stisipolcandradimuka.ac.id

ABSTRAK

Pendelegasian wewenang adalah salah satu aspek organisasi yang begitu penting di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, karena dapat mempercepat dan memperlancar dalam pelaksanaan pekerjaan, serta untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Semua organisasi memiliki tujuan yang ingin dituju dan wajib dirumuskan dengan jelas, pada pelaksanaan tujuan organisasi tersebut dituangkan menjadi tugas pokok. Permasalahan yang telah teridentifikasi dalam studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti yang harus diperhatikan mengenai Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan menjadi menarik untuk diteliti yaitu: 1). Terdapat pegawai yang melakukan tugas tidak berdasarkan tingkatan-tingkatan yang ada antara lain terdapat pegawai yang mengerjakan administrasi langsung kepada pimpinan tanpa melalui Sub Bidang Umum dan Kepegawaian. 2) Masih kurangnya kepercayaan pimpinan dalam memberikan pendelegasian wewenang kepada bawahan, pimpinan masih ikut campur dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pegawai menjadi merasa tidak dipercaya dan tidak melaksanakan pekerjaan yang sebelumnya diberikan kepadanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang bertujuan menggambarkan situasi tertentu, diuraikan dalam kata-kata atau kalimat tersendiri untuk mendapatkan kesimpulan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini ialah berdasarkan indikator transmisi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi telah berjalan dengan baik penyampaian akan informasi yang akan diberikan oleh masyarakat luas telah terstruktur terkait pada kebijakan-kebijakan serta program pemerintah dalam memberikan informasi secara konsisten.

Kata kunci : Implementasi, Pendelegasian, Wewenang**ABSTRACT**

Delegation of authority is one aspect of the organization that is very important as well as at the Department of Public Works of Highways and Spatial Planning of South Sumatra Province, because delegation will accelerate and expedite the implementation of work, by itself will avoid delays in the implementation of work. All organizations have a common goal. to be achieved and must be clearly formulated, in the implementation of the organization's goals it is poured into the

main task. The problems that have been identified in the preliminary study conducted by researchers that must be considered regarding the Delegation of Authority at the Public Works Department of Highways and Spatial Planning of South Sumatra Province are interesting to study, namely: 1). The existence of employees who carry out tasks not based on existing levels, among others, it is seen that there are employees who take care of administration directly to the leadership not through the General and Personnel Sub-Sector. 2) There is still distrust of the leadership in delegating authority to subordinates, in this case the leadership still interferes in the implementation of the work, which causes employees to feel distrusted and do not carry out the work that was previously submitted to them. This study uses a qualitative approach, which is a research procedure that aims to describe certain circumstances, which are described in separate words or sentences to obtain conclusions. The focus of the research in this study is the implementation of the policy of delegation of authority at the Public Works Department of Highways and Spatial Planning of the Province of South Sumatra. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques, while the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The conclusion of this study is that based on indicators of information transmission, information clarity and consistency of information have gone well, the delivery of information to be provided by the wider community has been structured in relation to government policies and programs in providing information consistently.

Keywords: *Implementation, Delegation, Authority*

PENDAHULUAN

Pendelegasian wewenang adalah sesuatu yang vital dan sangat penting dalam sebuah organisasi. Atasan harus menjalankan koordinasi dan pendelegasian wewenang koordinasi agar dapat kinerjanya dapat berjalan dengan baik. kemudian, pendelegasian wewenang merupakan dampak logis dari semakin besarnya organisasi. Jika atasan tidak ingin mendelegasikan wewenang, maka sebenarnya organisasi tersebut tidak membutuhkan orang lain selain dirinya sendiri. Bila atasan menghadapi pekerjaan yang banyak yang tak bisa dilakukan oleh satu orang, maka ia harus melakukan delegasi.

Agar Pimpinan dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi, terutama saat adanya perubahan susunan struktur organisasi maka pimpinan perlu melakukan pendelegasian. Koordinasi juga adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Pendelegasian wewenang adalah memberikan otoritas kepada orang lain, namun tidak menghilangkan otoritas Atasannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 611/KPTS/M/2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat bahwa telah terjadi pendelegasian wewenang urusan kepegawaian mengenai pendandatanganan surat keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian sesuai dengan bidang kelembagaannya.

Pendelegasian wewenang adalah salah satu aspek organisasi yang sangat penting begitu pula dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, karena dengan pendelegasian dapat mempercepat juga memperlancar dalam pelaksanaan pekerjaan, agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, pelaksana pendelegasian wewenang ini belum maksimal, dikarenakan tidak

seimbangnnya beban kerja dengan kewenangan yang diberikan oleh atasan sehingga pendelegasian pekerjaan atau wewenang yang diberikan oleh atasan tidak cocok dengan jenis pekerjaan yang diterima oleh bawahan meskipun sudah ada pembagian tugas dan bentuk pengorganisasian sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Sumsel No. 13 tahun 2020 tentang pembentukan, uraian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Membantu Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang jalan dan jembatan serta laboratorium bahan kontruksi. Tupoksi masing-masing Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, UPT Bina Marga dan Staf, namun pada pelaksanaan kewenangan atau otoritas cenderung sering berbenturan dengan kepentingan pribadi pimpinan. Oleh karena itu efektivitas kerja pegawai kurang baik dari segi kuantitas, kualitas dan waktu dikarenakan seringkali menunggu keputusan pimpinan.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara deskriptif

tentang Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar yang berupa undang-undang maupun perintah atau keputusan-keputusan yang penting misalnya keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui beberapa tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian hasil kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

(*Edwards III dalam Subarsono, 2005: 91-95*) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

Kebijakan

Berdasarkan Anderson dalam Wahab (Wahab & Solichin, 2004) menerangkan kebijakan sebagai langkah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau beberapa aktor berkenaan dengan munculnya isu atau masalah tertentu yang sedang dihadapinya. sehingga, kebijakan menurut Anderson adalah perbuatan yang disengaja oleh aktor yang berkaitan dengan masalah yang sedang di hadapi.

Wewenang

Menurut Sutarto (Sutarto, 2001), wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan supaya tanggung jawabnya dan tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Hasibuan (Malayu, 2007)

wewenang merupakan kekuasaan yang legal dan sah yang dimiliki seseorang untuk memberi perintah kepada orang lain, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kekuasaan adalah dasar hukum yang legal dan sah untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memberikan perintah kepada orang lain untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang adalah pemberian tanggung jawab dan wewenang kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang. Atasan melimpahkan kekuasaan kepada staf atau bawahan sehingga dapat melaksanakan tugas tersebut sebaik-baiknya dan bisa bertanggungjawabkan hal-hal yang didelegasikan pada mereka. Pendelegasian wewenang dari atasan kepada bawahan diperlukan agar tercapainya fungsi-fungsi dan efisiensi dalam organisasi karena tidak ada atasan yang secara penuh melaksanakan dan mengawasi semua tugas organisasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian contohnya, Tindakan, perilaku dan lain-lain dengan tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu antara kedua pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu (Suwandi, 2008) Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara tanya jawab langsung (tatap muka) antara informan dan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, juga akan mengumpulkan data dari beberapa sumber yang terkait dengan penelitian ini.

b. Observasi

Observasi merupakan cara-cara atau metode untuk menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat dan mengamati secara langsung kelompok atau individu (Suwandi, 2008). Metode ini dipakai untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti mendapatkan gambaran yang luas mengenai permasalahan yang diteliti. Observasi adalah pengamatan langsung pada suatu benda, perilaku, proses, situasi dan kondisi, misalnya luas ruangan, kondisi ventilasi dan sebagainya. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan

mengamati secara langsung terhadap Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode memperoleh data sekunder dengan mempelajari bahan bacaan atau literatur berupa buku-buku dan dokumen-dokumen dan sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari dokumen berada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya : data Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan . Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah ada dalam catatan dokumen (Suwandi, 2008). Dalam penelitian sosial kegunaan data yang bersumber dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai pelengkap dan data pendukung bagi data primer.

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. *Data Collection*/Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2008) untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti melakukan pengumpulan data secara sistematis dari berbagai sumber. Sumber yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder berdasarkan pada instrumen penelitian yang digunakan, yaitu berdasarkan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.
- b. *Data Condensation*/Kondensasi Data

Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2008) kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan) empiris lainnya. Kondensasi (pengembunan) data berarti mengubah data yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat. Kondensasi mengakomodir data secara menyeluruh tanpa harus mengurangi temuan lapangan yang diperoleh selama penelitian (proses penjarangan data) berlangsung.

c. *Data Display*/Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya adalah menyajikan data. Miles dan Huberman (Miles, M.B, Huberman & Saldana, 2014) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif). Berdasarkan konsep tersebut, penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan teks yang bersifat naratif atau dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori.

d. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2008) setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya ialah penarikan kesimpulan yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat berupa dua kemungkinan yaitu kemungkinan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal atau tidak dapat menjawab

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Komunikasi

- Transmisi Informasi

Berdasarkan pada data primer hasil wawancara yang telah didapatkan dapat diketahui bahwa penyebaran informasi yang terjadi telah sesuai dengan tujuan dimana pada transmisi informasi yang dilakukan mulai dari pemetaan perencanaan program sampai pada sosialisasi dan pelaksanaan program dapat tersampaikan dengan jelas pada beberapa petugas yang terlibat dalam menjalankan program dinas pekerja umum bina marga dan tata ruang di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan data sekunder yang didapat adalah berdasarkan dokumen renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel, contohnya transmisi informasi kebijakan yang dilakukan sosialisasi berupa surat edaran Kepala Dinas melalui penyampaian pesan media elektronik.

- **Kejelasan Informasi**

Berdasarkan data primer hasil wawancara, maka Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah suatu sistem organisasi pemerintahan yang merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pada kondisi memberikan informasi serta menyebarkan informasi perlu dilakukan dengan data yang valid agar semua program dapat dijalankan.

- **Konsistensi Informasi**

Konsisten merupakan sesuatu yang tidak berubah-ubah, selalu berperilaku atau terjadi dalam cara yang sama serta selaras sesuai dengan asas, pada konsistensi informasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sebelum memberikan informasi pengkajian berdasarkan data dan fakta dilapangan telah dilakukan observasi dan evaluasi agar proses dalam memutuskan dan

memberikan informasi kepada beberapa instansi dan petugas serta masyarakat dapat berjalan dengan baik dan terpercaya hal ini dikarenakan sesuai dengan asas serta perilaku yang tidak berubah-ubah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan dari masing-masing indikator tersebut diatas bahwa pada dimensi komunikasi dengan menggunakan beberapa indikator diantaranya : transmisi informasi, kejelasan informasi serta konsistensi informasi sudah berjalan dengan sangat baik hal ini akan mempermudah proses Pekerjaan Umum dan Bina Marga dalam melakukan implementasi serta melakukan kajian terkait pada wewenang yang telah diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

b. Sumber Daya

- **Staff**

Staff dapat diartikan sebagai unsur pembantu pimpinan yang melakukan beberapa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Staff yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa sumber daya staff telah berjalan dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari beberapa kemampuan staff dalam menyelesaikan pekerjaan dengan proses yang baik tidak terlepas dari

pengetahuan, keterampilan serta kemampuan sumber daya staff yang telah ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi dimiliki oleh para staff.

- **Wewenang**

Wewenang merupakan hak untuk memerintah orang lain untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan dengan bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi

Berdasarkan data primer hasil wawancara terkait pada wewenang yang dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan bahwa wewenang yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah terstruktur sesuai dengan keputusan yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, sebagaimana yang telah ditetapkan beberapa kebijakan dalam pelaksanaan dan pelaporan terkait pada implementasi dinas pekerjaan umum dan bina marga sesuai dengan tupoksi yang sudah dituliskan sesuai pada peraturan menteri serta peraturan gubernur Sumatera Selatan nomor 46 tahun 2016.

c. Sikap / Disposisi

- **Komitmen Pelaksana**

Komitmen merupakan perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu. Komitmen pelaksana pelayanan menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, oleh karena itu seharusnya komitmen pelaksana layanan harus didukung oleh berbagai faktor.

Faktor pertama yang mempengaruhi komitmen pelaksana pelayanan publik ialah komitmen organisasi, sebab performa pelaksana pelayanan publik sendiri, tidak dilepaskan dari manajerial yang dikerjakan oleh Pimpinan Organisasi.

Berdasarkan data primer wawancara dan data sekunder dari hasil observasi komitmen dalam pelaksanaan sudah berjalan dengan sangat baik terkait pada komitmen pelaksanaan yang telah terstruktur dan terprogram sama dengan tujuan yang akan dicapai melalui evaluasi data sekunder yang valid berupa surat keputusan Gubernur terkait tambahan TPP yang diberikan kepada Dinas untuk grade penilaian kinerja.

- **Insentif**

Insentif adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu kegiatan dengan bertujuan membuat suatu motivasi dan menyebarkannya secara massal. Secara tradisional, insentif berupa tindakan yang melebihi hasil yang diharapkan dan membentuk motivasi dari luar. Insentif yang dimaksud adalah tunjangan yang telah dikeluarkan dalam bentuk data sekunder Keputusan Gubernur terkait golongan pegawai.

Berdasarkan data sekunder peraturan gubernur tentang tambahan penghasilan pegawai besaran insentif yang didapatkan oleh para petugas dinas menjadi salah satu tolok ukur ketercapaian program – program harus diselesaikan berdasarkan pada perencanaan yang telah tersusun dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa insentif menjadi salah satu strategi untuk menaikkan

kinerja para petugas atau pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Kelembagaan pemerintah merupakan kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, selanjutnya diikuti dengan peraturan perundang-undangan Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdiri atas kelembagaan pemerintah pusat, pemerintah daerah otonom serta kelembagaan pemerintah desa atau kelurahan yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan serta untuk mencapai tujuan maupun melebihi hasil dari perkiraan yang sudah ditentukan dan mengacu pada Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2018 perubahan kedua Peraturan Gubernur No 4 Tahun 2013 mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai.

d. Struktur Birokrasi

- **Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Berdasarkan pada hasil wawancara bahwa dimensi standar operasional prosedur yang telah tersusun pada dinas pekerjaan umum bina marga dan tata ruang Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan sangat baik, hal ini terlihat pada beberapa perencanaan yang terdokumentasi dan terstruktur berdasarkan pada standar operasional prosedur yang dilakukan, dengan adanya standar operasional prosedur menjadikan program yang telah disusun akan dapat dilaksanakan dengan baik.

- **Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

Berdasarkan data primer hasil wawancara pada pertanggung jawaban merupakan unsur yang sangat mendukung dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas hal ini sebagai kunci utama dalam keberhasilan menjalankan semua program kerja serta implementasinya.

Dan data sekunder dari hasil Pelaporan yang dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban implementasi program yang telah direncanakan oleh dinas pekerjaan umum bina marga dan tata ruang sebagai bahan untuk program selanjutnya dalam bentuk laporan kinerja harian yang diserahkan kepada Kepala Dinas.

Hasil penelitian Implementasi

Kebijakan Pendelegasian wewenang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa berdasarkan pada beberapa dimensi seperti Komunikasi dengan hasil penelitian Transmisi informasi yang berjalan sudah sangat baik hal ini terlihat pada beberapa program perencanaan beserta laporan yang ada pada dinas pekerjaan umum bina marga dan tata ruang yang dapat dilaksanakan secara efektif.

Kejelasan informasi yang diterima sangat perlu diperhatikan dan menjadi salah satu sumber utama dalam menjalankan program serta pembuatan laporan terkait perkembangan pelaksanaan program hal ini telah berjalan cukup baik dengan kejelasan informasi yang telah dikaji terlebih dahulu membawa manfaat dan kemudahan dalam implementasi program pada dinas pekerjaan umum diantaranya informasi yang jelas dapat disampaikan dan diterima dengan mudah oleh

masyarakat yang akan merasakan dampak secara langsung dilingkungan sekitar tempat mereka tinggal, dengan kejelasan informasi mereka dapat memperhatikan pada azas kebermanfaatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan, Sumber Daya Manusia yang terdiri dari beberapa PNS dan Non PNS yang berada di instansi Dinas Pekerja Umum dan Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan. Sikap atau Disposisi dalam komitmen pelaksanaan program – program berjalan dengan sangat baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai melalui evaluasi data yang valid.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Implementasi Kebijakan Pendelegasian wewenang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- a. Komunikasi: berdasarkan indikator transmisi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi telah berjalan dengan baik penyampaian akan informasi yang akan diberikan oleh masyarakat luas telah terstruktur terkait pada kebijakan-kebijakan serta program pemerintah dalam memberikan informasi secara konsisten.
- b. Sumber daya: pada aspek staff dan wewenang telah terprogram dengan sangat baik hal ini terlihat pada posisi staff yang berada pada kantor dinas pekerjaan umum dan bina marga P rovinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan program dinas pekerja Umum Bina Marga dan Tata Ruang di Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Sikap / Disposisi: Komitmen pelaksana dan insentif sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat pada

komitmen pelaksanaan dan insentif yang telah terprogram terlihat pada pelaksanaan yang dilakukan dengan secara berkelanjutan.

- d. Struktur Birokrasi: Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun pada dinas pekerjaan umum dan bina marga Provinsi Sumatera Selatan sudah baik hal ini sesuai dengan pelaksanaan dilapangan bahwa dinas pekerjaan umum dan bina marga telah melaksanakan program-program yang terstruktur sesuai dengan kebijakan yang telah tertuang kebijakan gubernur. Serta pertanggung jawaban laporan disusun berdasarkan data dan fakta sesuai dengan hasil dari implementasi yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, M.B, Huberman A. & Saldana J, 2014. *Qualitative Data Analysis* 3rd ed., USA: Sage Publications.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Alfabeta.
- Sutarto, 2001. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suwandi B dan, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp.1689–1699.
- Wahab A & Solichin, 2004. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Malayu H, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.